



PERBANDINGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DI PULAU SULAWESI

Puspa Dewangga

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Halu Oleo

email: puspadewangga@uho.ac.id

Abstract

Income inequality remains one of the major challenges in regional economic development as it can hinder the equitable distribution of welfare among communities. This study aims to analyze and compare economic development and income inequality across the provinces of Sulawesi Island during the period 2016–2025. The research employs a descriptive comparative approach using secondary data obtained from Statistics Indonesia (BPS). The indicators used include Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices as a measure of economic development and the Gini Ratio as an indicator of income inequality. The findings reveal that all provinces in Sulawesi experienced positive economic growth throughout the study period. Central Sulawesi recorded the highest GRDP growth, largely driven by the expansion of the mining sector and downstream industrialization. In terms of inequality, most provinces showed a declining trend in their Gini Ratios, indicating improvements in income distribution, while West Sulawesi consistently exhibited the highest level of inequality. These findings suggest that economic growth is not necessarily accompanied by increasing income inequality. Therefore, development policies should focus not only on accelerating economic growth but also on ensuring a more equitable distribution of development outcomes across regions.

Keyword: Economic Growth, Income Inequality, Gini Ratio, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Sulawesi Island.

Abstrak

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan penting dalam pembangunan ekonomi regional karena dapat menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perkembangan ekonomi serta tingkat ketimpangan antar provinsi di Pulau Sulawesi selama periode 2016–2025. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator yang digunakan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebagai ukuran perkembangan ekonomi dan Rasio Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan Sulawesi Tengah mencatat peningkatan PDRB tertinggi yang didorong oleh perkembangan sektor pertambangan dan hilirisasi industri. Dari sisi ketimpangan, sebagian besar provinsi menunjukkan tren penurunan Rasio Gini, sementara Sulawesi Barat masih mencatat tingkat ketimpangan tertinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan ketimpangan, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan antarwilayah.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Rasio Gini, PDRB, Pulau Sulawesi.

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memperoleh akses ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Ketimpangan yang tinggi dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, memperbesar angka kemiskinan, serta menghambat proses pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, isu ketimpangan pendapatan menjadi perhatian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah (Hindun et al., 2019).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam. Perbedaan kondisi geografis, struktur ekonomi, dan tingkat pembangunan antar daerah menyebabkan munculnya disparitas pembangunan regional. Daerah yang memiliki dukungan infrastruktur, investasi, dan aktivitas ekonomi yang lebih besar cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya pembangunan (Farhan & Sugianto, 2022). Kondisi tersebut pada akhirnya tercermin dalam perbedaan tingkat pendapatan, kualitas hidup masyarakat, dan kesejahteraan antarwilayah.

Pulau Sulawesi merupakan salah satu kawasan strategis di Indonesia yang menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, capaian pembangunan antarprovinsi di Sulawesi masih menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Beberapa provinsi memiliki tingkat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, sehingga mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan regional. Variasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Pulau Sulawesi belum berlangsung secara merata (Rahmadhana & Utomo, 2022). Temuan tersebut sejalan dengan Budiman et al., (2023) yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai Indeks Williamson pada provinsi-provinsi di Sulawesi masih berada pada kategori ketimpangan yang relatif tinggi. Selain itu, perbedaan struktur ekonomi dan konsentrasi aktivitas ekonomi menjadi faktor penting yang memengaruhi disparitas pembangunan di kawasan Sulawesi.

Ketimpangan pembangunan di Sulawesi juga dapat diamati melalui perbedaan indikator ekonomi dan sosial antarprovinsi. Menurut Ode et al., (2024), disparitas regional tercermin dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, kualitas sumber daya manusia, serta indikator sosial ekonomi lainnya. Di sisi lain, menurut Wahyuni & Monika (2016) Ketimpangan

pendapatan pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti pendidikan, tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik juga semakin besar. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan masyarakat sulit memperoleh pekerjaan yang layak sehingga memperbesar ketimpangan pendapatan.

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai ketimpangan pendapatan umumnya menggunakan pendekatan regresi data panel atau analisis kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi berdasarkan indikator-indikator ekonomi yang relevan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Pulau Sulawesi.

Penelitian ini penting dilakukan karena Pulau Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan antar daerah. Analisis deskriptif mengenai ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pemerataan pendapatan, faktor-faktor yang berkaitan dengan ketimpangan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kondisi ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi serta menggambarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan antar wilayah di Pulau Sulawesi.

2. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan dalam suatu wilayah tidak tersebar secara merata di antara masyarakat. Ketimpangan pendapatan sering diukur menggunakan rasio gini atau koefisien gini yang memiliki nilai antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ketimpangan

pendapatan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah (Aqilah et al., 2024)

Menurut Todaro dan Smith dalam (Aqilah et al., 2024), ketimpangan pendapatan adalah distribusi pendapatan yang tidak proporsional di antara kelompok masyarakat dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi akibat perbedaan kepemilikan sumber daya, akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, serta tingkat produktivitas masyarakat. Ketimpangan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang cukup serius, terutama karena adanya perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah. Ketimpangan pembangunan antar daerah menyebabkan sebagian wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata dan berdampak pada meningkatnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat maupun antar daerah (Farhan & Sugianto, 2022)

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional

Simon Kuznets mengemukakan teori mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang dikenal dengan hipotesis kurva U terbalik (*Inverted U Hypothesis*). Menurut teori ini, pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Namun, ketika pembangunan ekonomi telah mencapai tahap yang lebih maju, ketimpangan pendapatan akan menurun karena manfaat pembangunan mulai dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat (Santoso & Mukhlis, 2021)

Teori Kuznets menjelaskan bahwa perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional menuju sektor modern menyebabkan terjadinya perubahan distribusi pendapatan. Pada tahap awal industrialisasi, masyarakat yang bekerja pada sektor modern memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibanding sektor tradisional sehingga ketimpangan meningkat. Akan tetapi, seiring meningkatnya pembangunan dan pemerataan kesempatan kerja, distribusi pendapatan akan menjadi lebih merata.

Teori ini relevan dalam menjelaskan kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia, termasuk di Pulau Sulawesi. Perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah di Sulawesi menyebabkan beberapa daerah berkembang lebih cepat dibanding daerah lainnya. Akibatnya, distribusi pendapatan masyarakat antar wilayah menjadi tidak seimbang.

Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan (Dependency Theory) yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, dan Fernando Henrique Cardoso menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan ketersediaan faktor produksi atau proses pembangunan yang berlangsung secara alami. Ketimpangan tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan struktural yang tidak seimbang antara wilayah inti (core) dan wilayah periferi (periphery). Dalam hubungan ini, wilayah inti memiliki kendali yang lebih besar terhadap modal, teknologi, pasar, serta kekuatan politik, sedangkan wilayah periferi berfungsi sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja berbiaya rendah, dan pasar bagi produk yang dihasilkan oleh wilayah inti. Akibatnya, surplus ekonomi yang dihasilkan wilayah periferi cenderung mengalir ke wilayah inti melalui mekanisme perdagangan yang tidak seimbang, investasi eksternal, serta ketergantungan terhadap teknologi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut menghambat kemampuan wilayah periferi untuk membangun sektor industri secara mandiri dan memperkuat ketimpangan pembangunan yang telah ada (Ferraro, 2008).

Dalam kajian ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Pulau Sulawesi, Teori Ketergantungan dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah tidak selalu mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketika aktivitas pengolahan dan hilirisasi sumber daya lebih banyak dikendalikan oleh investor dari luar daerah maupun luar negeri, sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan berpotensi mengalir keluar dari wilayah tersebut. Situasi ini menyebabkan perekonomian daerah tetap bergantung pada ekspor komoditas primer dan aliran modal eksternal. Ketergantungan tersebut meningkatkan kerentanan daerah terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar internasional maupun perubahan kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, teori ini memberikan kerangka untuk memahami pola ketimpangan struktural yang dapat terjadi pada berbagai provinsi yang memiliki perekonomian berbasis sumber daya alam dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap modal dari luar daerah.

Selain itu, Teori Ketergantungan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata. Dalam banyak kasus, wilayah yang mengalami pertumbuhan pesat berbasis ekspor komoditas primer justru tetap menghadapi kesenjangan pendapatan yang tinggi karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok pemilik modal dan pihak eksternal yang mengendalikan proses produksi serta distribusi. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah lokal,

memperkuat kapasitas industri domestik, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata kepada masyarakat. Dengan demikian, ketergantungan terhadap modal, teknologi, dan pasar dari luar dapat menjadi faktor yang memperlebar ketimpangan antarwilayah meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat (Cardoso & Faletto, 1979)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan membandingkan perkembangan ekonomi serta tingkat ketimpangan antar provinsi di Pulau Sulawesi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi perekonomian dan ketimpangan yang terjadi pada masing-masing provinsi tanpa melakukan pengujian hubungan sebab akibat antar variabel penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2016-2025 sebagai indikator perkembangan ekonomi dan Rasio Gini tahun 2016-2025 sebagai indikator ketimpangan pendapatan. Data diperoleh melalui publikasi resmi Badan Pusat Statistik.

Objek penelitian mencakup seluruh provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Penelitian dilakukan dengan mengamati perkembangan PDRB dan Rasio Gini pada masing-masing provinsi selama periode penelitian yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan data, laporan, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Selain data statistik dari BPS, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai referensi dari jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu sebagai pendukung analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan perkembangan ekonomi dan tingkat ketimpangan antar provinsi di Pulau Sulawesi berdasarkan nilai PDRB dan Rasio Gini. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik, dan uraian deskriptif sehingga memudahkan interpretasi terhadap perbedaan kondisi ekonomi dan ketimpangan yang terjadi di setiap provinsi.

Dalam penelitian ini, PDRB digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan perkembangan ekonomi daerah. Peningkatan nilai PDRB menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah. Sementara itu, Rasio Gini digunakan sebagai indikator

utama untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan. Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. Dengan membandingkan kedua indikator tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan ekonomi dan ketimpangan di masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: (1) potensi bias komparasi PDRB antarprovinsi akibat perbedaan tahun dasar yang digunakan BPS; (2) kemungkinan revisi data BPS di kemudian hari karena data yang digunakan merupakan rilis awal 2026; serta (3) keterbatasan metode deskriptif yang tidak mampu mengukur kontribusi statistik masing-masing faktor terhadap ketimpangan, sehingga rekomendasi kebijakan bersifat kualitatif dan perlu didukung studi kuantitatif lanjutan.

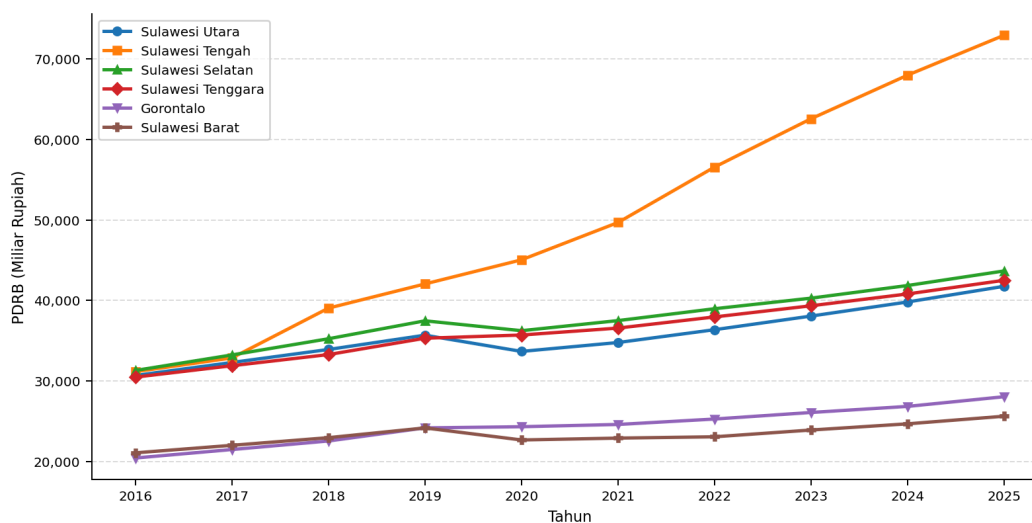
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perkembangan PDRB Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2016–2025

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, seluruh provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif selama periode 2016–2025. Pada tahun 2016, nilai PDRB tertinggi dimiliki oleh Sulawesi Selatan sebesar Rp31.303 miliar, diikuti oleh Sulawesi Utara sebesar Rp30.680 miliar, dan Sulawesi Tenggara sebesar Rp30.476 miliar. Sulawesi Barat mencatat PDRB terendah sebesar Rp21.068 miliar, sementara Gorontalo berada di angka Rp20.427 miliar. Namun demikian, pada tahun 2025, komposisi ini berubah signifikan di mana Sulawesi Tengah mengalami lonjakan PDRB tertinggi menjadi Rp72.959 miliar, jauh melampaui provinsi lainnya. Pertumbuhan Sulawesi Tengah yang sangat pesat ini berkaitan erat dengan perkembangan sektor pertambangan nikel dan hilirisasi industri di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan PDRB keenam provinsi di Sulawesi bersifat konsisten dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sulawesi Selatan yang semula memiliki PDRB tertinggi pada 2016 kini berada di posisi kedua pada 2025 dengan nilai Rp43.671 miliar, sementara Gorontalo tetap menjadi provinsi dengan PDRB terendah di angka Rp28.042 miliar. Data PDRB lengkap selama periode penelitian disajikan pada Grafik di bawah ini.



Gambar 1. Perkembangan PDRB Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2016–2025

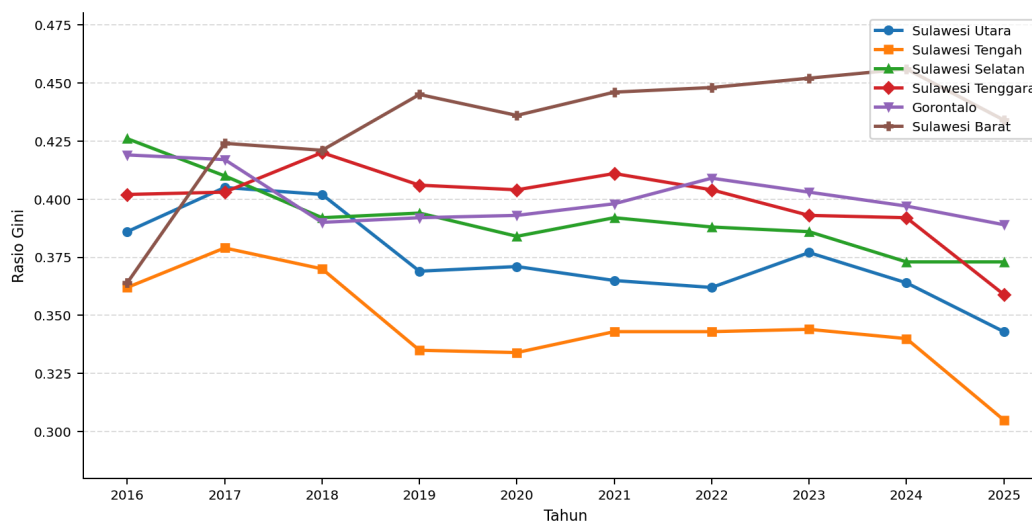
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2026)

Temuan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa meskipun seluruh provinsi mengalami pertumbuhan ekonomi, peningkatan tersebut tidak terjadi secara merata. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi hasil pembangunan, selanjutnya difokuskan pada perkembangan Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Pulau Sulawesi.

Perkembangan Rasio Gini Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2016–2025

Berbeda dengan PDRB yang menunjukkan pertumbuhan konsisten, perkembangan Rasio Gini di Pulau Sulawesi memperlihatkan tren yang lebih beragam antar provinsi. Sulawesi Barat secara konsisten mencatat Rasio Gini tertinggi selama seluruh periode penelitian, dengan nilai terendah 0,364 pada 2016 yang kemudian terus meningkat hingga mencapai puncak 0,456 pada 2024, sebelum sedikit menurun menjadi 0,434 pada 2025. Sebaliknya, Sulawesi Tengah justru berhasil menekan Rasio Gini secara signifikan dari 0,362 pada 2016 menjadi 0,305 pada 2025, menjadikannya provinsi dengan ketimpangan terendah pada akhir periode penelitian.

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara menunjukkan Rasio Gini yang cenderung menurun selama periode penelitian, masing-masing dari 0,426 dan 0,402 pada 2016 menjadi 0,373 dan 0,359 pada 2025. Gorontalo dan Sulawesi Utara juga memperlihatkan tren serupa, meski penurunannya lebih moderat. Secara umum, seluruh provinsi di Sulawesi menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan pendapatan pada beberapa tahun terakhir, meskipun nilainya masih berada pada kategori sedang hingga tinggi. Data Rasio Gini lengkap selama periode penelitian disajikan pada grafik berikut.



Gambar 2. Perkembangan Rasio Gini Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2016–2025
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2026)

Berdasarkan Gambar 2, perkembangan Rasio Gini di Pulau Sulawesi menunjukkan kecenderungan penurunan ketimpangan pendapatan selama periode 2016–2025. Sulawesi Tengah mencatat penurunan yang paling signifikan, diikuti oleh Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Gorontalo juga mengalami penurunan meskipun relatif lebih lambat. Berbeda dengan provinsi lainnya, Sulawesi Barat masih menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dan cenderung meningkat pada sebagian besar periode pengamatan sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di sebagian besar provinsi Sulawesi semakin merata, meskipun tingkat pemerataannya masih berbeda antarwilayah. Jika dibandingkan dengan perkembangan PDRB pada Gambar 1, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa provinsi tidak selalu diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, bahkan pada beberapa kasus justru berlangsung bersamaan dengan membaiknya distribusi pendapatan masyarakat.

PEMBAHASAN

Dinamika Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan di Pulau Sulawesi

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan PDRB yang signifikan selama periode 2016–2025. Pertumbuhan paling menonjol terjadi di Sulawesi Tengah yang berhasil meningkatkan nilai PDRB-nya dari Rp31.151 miliar pada 2016 menjadi Rp72.959

miliar pada 2025, atau tumbuh lebih dari 134 persen. Lonjakan ini terutama didorong oleh ekspansi besar-besaran sektor pertambangan dan pengolahan nikel di Morowali yang menjadi pusat kawasan industri strategis nasional. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ode et al., (2024) yang menyatakan bahwa perbedaan PDRB per kapita antarprovinsi di Sulawesi mencerminkan disparitas pembangunan yang dipengaruhi oleh konsentrasi aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan tertentu. Sementara itu, Sulawesi Barat dan Gorontalo menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat karena masih mengandalkan sektor pertanian dan memiliki keterbatasan infrastruktur dalam mendukung transformasi struktural ekonominya. Selain itu, perbedaan struktur ekonomi antarprovinsi menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki basis industri dan investasi yang kuat cenderung mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor primer. Kondisi ini menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi antarprovinsi menjadi tidak seragam dan berpotensi menciptakan kesenjangan pembangunan yang semakin lebar apabila tidak diimbangi dengan pemerataan investasi dan pembangunan infrastruktur.

Temuan mengenai perbedaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan antarprovinsi di Pulau Sulawesi juga dapat dijelaskan melalui Teori Ketergantungan. Menurut Ferraro (2008), wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah sering kali tetap menghadapi ketimpangan pembangunan apabila proses produksi, investasi, dan penguasaan teknologi didominasi oleh pihak eksternal. Dalam konteks Sulawesi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa provinsi, khususnya yang didorong oleh sektor pertambangan dan industri berbasis sumber daya alam, belum tentu secara otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kondisi ini terjadi karena sebagian manfaat ekonomi yang dihasilkan berpotensi mengalir ke luar daerah melalui kepemilikan modal, jaringan distribusi, maupun penggunaan teknologi yang berasal dari luar wilayah. Akibatnya, meskipun nilai PDRB meningkat secara signifikan, dampaknya terhadap pemerataan pendapatan dapat berbeda-beda pada setiap provinsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mempertahankan dan mendistribusikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal.

Di sisi lain, kondisi ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Rasio Gini menunjukkan pola yang beragam antarprovinsi. Sulawesi Barat secara konsisten mencatat Rasio Gini tertinggi di antara provinsi-provinsi Sulawesi, yaitu 0,364 pada 2016 dan meningkat hingga puncaknya 0,456 pada 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 0,434 pada 2025. Nilai ini jauh berada di atas rata-rata nasional dan mengindikasikan ketimpangan yang cukup tinggi.

Sulawesi Tengah justru menunjukkan perkembangan yang kontras: meski pertumbuhan ekonominya paling tinggi, Rasio Gini-nya berhasil diturunkan dari 0,362 pada 2016 menjadi 0,305 pada 2025, merupakan angka terendah di antara seluruh provinsi Sulawesi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat di Sulawesi Tengah relatif lebih inklusif dibandingkan provinsi lain, kemungkinan karena penyerapan tenaga kerja yang lebih luas pada sektor industri pengolahan. Hal ini mendukung argumen Rahmadhana & Utomo, (2022) bahwa diversifikasi basis ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lintas sektor berperan penting dalam mengurangi ketimpangan di kawasan Sulawesi. Selain Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara juga menunjukkan tren penurunan Rasio Gini meskipun dengan laju yang lebih moderat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut mulai diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi mulai memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi lokal.

Meskipun Sulawesi Tengah berhasil mencatat pertumbuhan PDRB tertinggi sekaligus penurunan Rasio Gini paling drastis, fenomena ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena mengandung potensi risiko *enclave economy*. Lonjakan PDRB sebesar 134 persen dalam satu dekade hampir sepenuhnya ditopang oleh sektor pertambangan nikel dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morowali. Ciri-ciri *enclave economy* antara lain: rendahnya keterkaitan dengan sektor ekonomi lokal, terbatasnya penyerapan tenaga kerja daerah, serta besarnya aliran keuntungan ke luar wilayah. Data BPS menunjukkan bahwa meskipun PDRB melonjak, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah pada beberapa tahun masih berada di atas rata-rata nasional (BPS, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor nikel belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara luas. Jika harga komoditas nikel turun atau kebijakan hilirisasi berubah, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, penurunan Rasio Gini di provinsi ini belum bisa secara otomatis diartikan sebagai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan tanpa didukung oleh peningkatan lapangan kerja lokal, penguatan keterkaitan sektor hulu-hilir dengan ekonomi domestik, serta distribusi manfaat yang lebih merata kepada masyarakat sekitar kawasan industri.

Temuan penelitian ini juga relevan dikaitkan dengan teori hipotesis kurva U terbalik Kuznets. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat seiring akselerasi pertumbuhan ekonomi karena manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata. Data Sulawesi Barat

memperlihatkan pola tersebut dengan jelas: pertumbuhan ekonomi yang berlangsung namun Rasio Gini justru meningkat dari 2016 hingga 2024 sebelum mulai menurun pada 2025. Hal ini konsisten dengan temuan Santoso & Mukhlis, (2021) yang menunjukkan bahwa pada tahap industrialisasi awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk sebelum akhirnya membaik seiring pemerataan akses ekonomi. Di sisi lain, Sulawesi Utara menunjukkan tren penurunan Rasio Gini dari 0,386 pada 2016 menjadi 0,343 pada 2025, mengindikasikan bahwa provinsi ini mulai memasuki fase konvergensi sebagaimana diprediksi oleh teori Kuznets. Pola yang serupa juga dapat diamati pada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang mengalami pertumbuhan ekonomi disertai penurunan tingkat ketimpangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan mulai menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap provinsi berada pada tahapan pembangunan yang berbeda-beda sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak selalu bersifat linear.

Secara komparatif, disparitas antar provinsi di Pulau Sulawesi mencerminkan ketidakmerataan pembangunan yang struktural. Budiman et al. (2023) menegaskan bahwa rata-rata Indeks Williamson di provinsi-provinsi Sulawesi masih berada dalam kategori ketimpangan yang relatif tinggi, yang mengindikasikan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi masih terpusat di beberapa wilayah tertentu. Farhan & Sugianto, (2022) menambahkan bahwa daerah dengan dukungan infrastruktur dan investasi yang lebih baik cenderung tumbuh lebih cepat, menciptakan lingkaran yang memperlebar kesenjangan antar daerah. Kondisi ini juga dipertegas oleh Hindun et al., (2019) yang membuktikan bahwa variabel pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Perspektif Teori Ketergantungan juga membantu menjelaskan mengapa kesenjangan pembangunan antarprovinsi di Sulawesi masih terjadi meskipun sebagian besar wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Provinsi yang memiliki akses lebih besar terhadap investasi, teknologi, infrastruktur, dan jaringan industri cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang masih mengandalkan sektor primer tradisional. Ketimpangan akses terhadap faktor-faktor tersebut dapat menciptakan hubungan yang tidak seimbang antara wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah yang relatif tertinggal. Cardoso dan Faletto (1979) menjelaskan bahwa pola ketergantungan semacam ini menyebabkan sebagian wilayah mengalami keterbatasan dalam menciptakan nilai tambah secara mandiri sehingga manfaat pembangunan tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan

bahwa pengurangan ketimpangan regional memerlukan upaya penguatan kapasitas ekonomi daerah agar tidak hanya menjadi pemasok sumber daya, tetapi juga mampu mengembangkan sektor-sektor produktif yang menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar provinsi mengalami penurunan Rasio Gini, kesenjangan kapasitas ekonomi yang tercermin dari perbedaan nilai PDRB antarprovinsi masih cukup besar. Artinya, pemerataan distribusi pendapatan dalam suatu provinsi belum tentu diikuti oleh pemerataan pembangunan antarprovinsi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan wilayah perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah, pemerataan investasi, serta pengembangan sektor-sektor unggulan di daerah yang relatif tertinggal. Implikasinya, penanganan ketimpangan di Sulawesi tidak cukup hanya melalui stimulus pertumbuhan ekonomi, melainkan harus disertai intervensi kebijakan yang komprehensif di bidang pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal seperti Gorontalo dan Sulawesi Barat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh provinsi di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif selama periode 2016–2025, yang tercermin dari peningkatan nilai PDRB di setiap provinsi secara konsisten. Sulawesi Tengah menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, menjadikannya provinsi dengan PDRB tertinggi pada akhir periode penelitian. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan yang proporsional di seluruh wilayah.

Dari sisi ketimpangan pendapatan, terdapat variasi yang cukup signifikan antar provinsi. Sulawesi Barat secara konsisten mencatat Rasio Gini tertinggi, menandakan tingkat ketimpangan yang paling besar, sementara Sulawesi Tengah berhasil menurunkan ketimpangannya secara berkelanjutan hingga menjadi yang terendah di antara provinsi-provinsi Sulawesi. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatannya dipengaruhi oleh struktur ekonomi sektoral, kapasitas penyerapan tenaga kerja, dan aksesibilitas pembangunan yang berbeda-beda di setiap provinsi

Saran

Pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Barat dan Gorontalo, perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan agregat. Peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, pengembangan infrastruktur di daerah terpencil, serta stimulasi investasi padat karya perlu diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Pulau Sulawesi.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan metode analisis yang lebih mendalam seperti regresi data panel guna mengidentifikasi faktor-faktor yang secara statistik mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Pulau Sulawesi. Penelitian berikutnya juga dapat mempertimbangkan penambahan variabel seperti tingkat pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan belanja pemerintah daerah agar analisis menjadi lebih komprehensif. Selain itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut pada level kabupaten/kota untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai disparitas pembangunan di dalam masing-masing provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqilah, M. R. Al, Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU SUMATERA. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(1).
- Badan Pusat Statistik (BPS) - Statistics Indonesia. (2026). Statistical Yearbook of Indonesia 2026. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- Budiman, A., Zamhuri, M. Y., & Fitrianti, R. (2023). Determinants of regional development inequality in Sulawesi. In *Enrichment: Journal of Management* (Vol. 13, Number 3).
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. Berkeley: University of California Press
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Ferraro, V. (2008). Dependency Theory: An Introduction. In G. Secondi (Ed.), *The Development Economics Reader* (pp. 58-64). London: Routledge

- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Ode, M. F., Rianda, L., Yani Balaka, M., Taridalla, S., Padar, S. A., Hiromi, R., Rahmatika, S., & Fajar, N. A. (2024). Analysis of Regional Disparities in Socio-Economic Aspects in Southeast Sulawesi Province. *Geographica: Science & Education Journal*, 6(1), 73–83.
- Rahmadhana, A. Z. I., & Utomo, A. P. (2022). Ketimpangan Pendapatan dan Determinan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi Tahun 2017-2020. *Prosiding Semi Ar Nasional Official Statistic*. <https://doi.org/https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1224>
- Santoso, F. D. P., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, 1(2), 146–162. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162>
- Wahyuni, R. N. T., & Monika, A. K. (2016). PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN TENAGA KERJA DI INDONESIA (THE IMPACT OF EDUCATION ON INCOME INEQUALITY AMONG INDONESIAN WORKERS). *Juni*, 11(1), 15–28.